

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Gerakan reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru mengakibatkan kondisi bangsa Indonesia saat ini sangat kompleks serta bersifat multidimensional sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan bersungguh-sungguh. Berdasarkan kondisi umum dan arah kebijakan dalam GBHN 1999-2004 dapat diidentifikasi 5 (lima) permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, permasalahan tersebut adalah:

1. Merebaknya konflik sosial dan munculnya gejala Dis-Integrasi bangsa.
2. Lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia.
3. Lambatnya pemulihan ekonomi.
4. Rendahnya kesejahteraan rakyat, meningkatnya penyakit sosial dan lemahnya ketahanan budaya nasional.
5. Kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan masyarakat.<sup>1</sup>

Permasalahan pokok Bangsa Indonesia tersebut menghalangi pemerintah dalam melaksanakan Program Pembangunan Nasional (Propenas). Bangsa Indonesia adalah Negara berkembang yang sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah/daerah pedesaan dan sebagian saja yang tinggal di wilayah/daerah perkotaan, maka pembangunan desa akan tetap memegang peran sangat penting dalam Pembangunan Nasional. Karena

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2000, Tentang Program Pembangunan Nasional, hal 21

pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Pembangunan Nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”<sup>2</sup>

Bagi Negara berkembang, kemiskinan pada umumnya juga menampilkan fakta bahwa mayoritas penduduk yang berada dalam garis kemiskinan berada di daerah pedesaan, maka dalam rangka pemerataan hasil pembangunan, meningkatkan hasil pembangunan dan meninggikan tingkat kemakmuran, masyarakat desa selalu memperoleh perhatian umum dari pemerintah, karena pembangunan akan berhasil apabila hasil pembangunan dapat merata dan dinikmati oleh seluruh rakyat dipenjuru tanah air. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan Nasional pemerintah menetapkan suatu kebijaksanaan pembangunan bahwa titik berat pembangunan perlu diarahkan ke masyarakat pedesaan.

Pembangunan desa di laksanakan selaras dengan pembangunan daerah dan pembangunan Nasional, karena itu pembangunan desa merupakan bagian penting dan penjabaran dari pembangunan daerah dan pembangunan Nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di daerah.

---

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2000, Tentang Program Pembangunan Nasional, hal 15

Pembangunan desa mencakup semua kegiatan pembangunan di desa yang dilakukan oleh seluruh sektor pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka pemerataan pembangunan sampai ke daerah pedesaan, hasil yang cukup menonjol di bidang pembangunan desa dengan kata lain wujud pembangunan keberhasilan pembangunan desa ditandai dengan :

1. Adanya peningkatan dan pemerataan dalam peluang antar daerah, desa dan kota dalam meningkatkan produktifitas masyarakat menuju tingkat keswadayaan dalam pembangunan.
2. Peningkatan fungsi kelembagaan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
3. Peningkatan pendapatan masyarakat karena adanya diservikasi kegiatan antar beberapa bidang dan sektor pembangunan.
4. Peningkatan koordinasi penanganan kegiatan pembangunan dalam rangka peningkatan pemerataan pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat melalui proses perencanaan dari bawah.<sup>3</sup>

Keberhasilan pembangunan fisik desa di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor kepemimpinan, yaitu menyangkut peran kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan, faktor partisipasi masyarakat, yaitu menyangkut peran masyarakat desa dalam pembangunan, faktor koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu menyangkut koordinasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program

---

<sup>3</sup> Depdagri, Dirljen Pembangunan Masyarakat Desa, Kebijakan Pembangunan Pedesaan pada PJPT II, 1994 hal 149

pembangunan dan faktor strategi pembangunan yaitu menyangkut kesesuaian performan strategi mengenai sasaran, target dan tujuan serta mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pembangunan desa baik fisik maupun pembangunan non fisik perlu diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan desa yang nyata dan bertanggung jawab dalam mengolah potensi desa secara nyata, optimal dan terpadu.

Dalam pembangunan desa ini yang perlu diperhatikan adalah pembangunan desa memerlukan biaya yang besar, tenaga yang besar dan waktu yang lama serta partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pembangunan, karena keterlibatan masyarakat desa setempat secara langsung dan juga aparat desa. Dari sinilah akan muncul ide-ide pembangunan yang mendorong berhasilnya sebuah pembangunan

Secara umum, dalam pembangunan desa ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu: biaya, tenaga, tanggung jawab dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu aparat desa hendaknya menggali kekeyaan desa secara optimal demi keberhasilan pembangunan fisik desa.

Sumber-sumber Pendapatan Desa berdasar Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2007 adalah:

1. Pendapatan asli desa
  - a. Hasil usaha desa
  - b. Hasil kekayaan desa, yaitu:
    - tanah desa
    - pasar desa
    - Bangunan milik desa
    - Objek rekreasi yang diurus desa
    - Pemandian umum yang diurus desa
    - Tempat pemancingan di sungai yang dikelola desa
    - Lain-lain pendapatan milik desa
  - c. Hasil swadaya dan partisipasi
  - d. Hasil gotong royong
  - e. Pendapatan lain-lain yang sah yang ditetapkan dengan peraturan desa
2. Bantuan dari pemerintah kabupaten
3. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi
4. Sumbangan dari pihak ketiga
5. Pinjaman desa

Walaupun besar kecilnya suatu pembangunan fisik desa tergantung dari besar kecilnya pendapatan asli daerah, tapi ada satu hal yang menjadi faktor pendorongnya keberhasilan suatu pembangunan fisik desa yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi dari masyarakatlah yang nantinya akan melaksanakan pembangunan tersebut. Pembangunan tidak akan berjalan

jika tidak ada partisipasi masyarakat yang besar dan juga partisipasi masyarakat adalah penentu keberhasilan dari sebuah pembangunan terutama pembangunan fisik desa. Hal ini dikarenakan faktor manusialah yang sebagai pihak pengelola dan sekaligus pelaksana dari pembangunan tersebut.

Dalam proses pembangunan fisik desa sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat desa, baik dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi pembangunan. Karena jika tidak ada partisipasi dari masyarakat maka suatu pembangunan tidak akan terwujud dan terlaksana dengan baik. Untuk itu peneliti akan meneliti partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa.

Begitu pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa, serta untuk melihat bagaimana sebenarnya proses pembangunan yang terjadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Untuk itu penulis akan meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan fisik desa di Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat peneliti sampaikan perumusan masalah sebagai berikut:

*“Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan fisik di Desa Payaman Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2006/2007?”*

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui sejauhmana partisipasi masyarakat dalam program perencanaan pembangunan fisik desa.
2. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa.
3. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan fisik desa.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan pada perkembangan ilmu pemerintahan khususnya tentang pembangunan fisik desa.
2. Hasil penelitian ini juga memberikan banyak sumbangan kepada pemerintah desa Payaman, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan desa.

### **E. Kerangka Dasar Teori**

Teori adalah perumusan tentang kemungkinan dapat di tambahkan karena untuk sebuah teori dapat dirumuskan dalam taraf ketelitian yang berbeda, tergantung dari kekuatan susunan yang diberikan.<sup>4</sup> Suatu teori menjadi penting dikemukakan adalah supaya rangkaian konsep definisi dan

---

<sup>4</sup> Winarno Surachmad, Dasar dan Teknik Reseach, Pengantar Metodologi Ilmiah, Tatsito, Bandung 1983 hal 5

proposisi yang saling berkaitan dapat memberi gambaran yang sistematis mengenai suatu gejala.

Menurut *Koentjaraningrat*, teori adalah

*“Merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.”*<sup>5</sup>

Dari definisi tersebut di atas, teori mengandung 3 hal:

1. Teori adalah serangkaian proposisi antar konsep yang saling berhubungan
2. Teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep
3. Teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

#### 1.) Partisipasi Masyarakat

##### a. Partisipasi

Keith Davis memberikan pengertian tentang partisipasi adalah sebagai berikut:

*“Partisipasi adalah sebagai keterlibatan seseorang dalam situasi kelompok baik secara mental atau pikiran maupun emosional atau perasaan yang mendorongnya untuk menyumbangkan daya pikiran perasaan bagi terciptanya tujuan kelompok dan ikut serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompok.”* ( Keith Davis, 1982:25)

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo pengertian partisipasi adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Koentjaraningrat, “Metode-Metode Penelitian Masyarakat”, PT Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1990 hal 87



*“Keikutsertaan aktif atas partisipasi dapat berarti pula keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Keterlibatan memikul tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.”<sup>6</sup>*

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi seseorang dalam suatu kegiatan pembangunan dimana keterlibatan nya tersebut dilakukan bertahap yaitu mulai dari penentuan kebijaksanaan proses memikul tanggung jawab secara moril maupun materiil dalam menikmati hasil dan manfaat pembangunan itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan macam-macam partisipasi menurut Davis dapat dibagi dalam beberapa jenis yaitu: a) partisipasi pikiran, b) partisipasi tenaga, c) partisipasi tenaga dan pikiran, d) partisipasi keahlian, e) partisipasi barang dan f) partisipasi uang.<sup>7</sup>

Adapun 10 Prinsip dasar Partisipasi adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Ajakan berpartisipasi disosialisasikan.
- b. Tujuan dan partisipatif senantiasa diuraikan sejelas mungkin pada tahap awal.
- c. Akses terhadap seluruh dokumen dan berbagai formasi terkait yang menjadi agenda pembahasan dan pengelolaan pembangunan harus terbuka secara transparan.

---

<sup>6</sup> Tjokroamidjojo, Bintoro, ”Perencanaan Pembangunan”, PT Agung, Jakarta, 1985 hal 207

<sup>7</sup> Davis, Keith, dalam Santoro Sastropoetra, “Partisipasi Komunikasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional”, Alumni, Bandung, 1988 hal 16

<sup>8</sup> Drs. H. Syaokani HR,MM. Pembaharuan Demokrasi Lokal : Dalam Makalah Mengenai Otonomi Daerah.

- d. Semua pihak mempunyai fungsi sebagai pengambilan keputusan.
  - e. Setiap pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan pembangunan harus memiliki hak yang seimbang untuk menyalurkan aspirasinya yang pada tingkatan proses pengambilan keputusan.
  - f. Setiap aspirasi harus diperhatikan tanpa adanya diskriminasi terhadap sumber aspirasi tersebut.
  - g. Pendanaan yang memadai untuk sebuah proses partisipasi harus disepakati bersama, disediakan dan dipublikasikan.
  - h. Diperlukan fasilitator yang professional dalam proses pengambilan keputusan.
  - i. Kesepakatan akhir dari kebijakan yang dihasilkan harus dapat dipahami alasannya.
  - j. Proses partisipasi dalam penentuan kebijakan harus berevaluasi secara berkala.
- b. Masyarakat

Menurut Linton, seorang ahli antropologi mengutamakan pendapatnya bahwa masyarakat adalah:

*“setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.”*<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Koentjoroningrat, masyarakat adalah:

---

<sup>9</sup> Linton dalam Abu Ahmadi, Sosiologi dan Anthropologi, CV, Pelangi, Surabaya, 1985, hal.68

*“Sekelompok atau kesatuan manusia yang saling berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh rasa identitas kebersamaan.”<sup>10</sup>*

Berdasarkan pengertian tersebut pengertian masyarakat adalah sekelompok atau kesatuan manusia yang telah lama hidup dan bertempat tinggal disuatu daerah tertentu yang saling berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu dan terikat oleh rasa identitas kebersamaan. Jadi dalam hal ini yang menjadi unsur masyarakat adalah:

1. Harus ada kelompok (pengumpulan) manusia dan harus banyak jumlahnya.
2. Telah berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah tertentu.
3. Adanya aturan-aturan (undang-undang) yang mengatur tata hidup mereka, untuk menuju pada tujuan yang sama.<sup>11</sup>

#### c. Partisipasi Masyarakat

Menurut Mubyarto, partisipasi masyarakat adalah

*”Kesediaan untuk membantu berhasilnya suatu program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan pribadi.”<sup>12</sup>*

Makna yang dapat dikemukakan dari pendapat diatas menurut penulis adalah partisipasi sikap kesadaran seseorang secara mental pikiran dan emosi atau perasaan untuk ikut terlibat dalam bentuk-

---

<sup>10</sup> Koentjoroningrat, Dalam Ketetapan-Ketetapan MPR RI tentang GBHN, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1993, hal. 17

<sup>11</sup> Op.cit, hal 67

<sup>12</sup> Mubyarto, “Strategi Pembangunan Desa Terpadu”, PPSK, UGM, Yogyakarta, 1982 hal 35

bentuk kegiatan atau program-program pemerintah tanpa unsur paksaan.

Menurut Bintoro Tjoktomidjojo, pada dasarnya partisipasi masyarakat menyangkut 2 aspek yaitu:

1. Partisipasi sebagai hak

Mengandung pengertian bahwa setiap masyarakat merupakan peluang untuk berpartisipasi guna memanfaatkan kesempatan yang timbul dalam proses pembangunan disamping berhak ikut menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri.

2. Partisipasi sebagai kewajiban

Mengandung pengertian bahwa setiap masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memikul beban tanggung jawab dan mensukseskan jalannya pembangunan.<sup>13</sup>

Jadi dengan demikian dapat dikatakan apa yang dimaksud dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam penelitian ini adalah sampai sejauh mana keterlibatan atau penyertaan mental pikiran dan perasaan serta energi atau fisik untuk mendukung program pembangunan pemerintah.

Kondisi yang mendukung partisipasi masyarakat adalah:

1. Strategi pembangunan diarahkan bagi masyarakat miskin.
2. Adanya struktur kepemimpinan yang cocok, karena para pemimpin desa mempunyai kepentingan yang sama dengan si

---

<sup>13</sup> Tjokroamidjojo, Bintoro, "Perencanaan Pembangunan", PT Gunung Agung, Jakarta, 1985 hal 209

miskin itu sendiri atau karena adanya persaingan yang signifikan untuk kedudukan kepemimpinan dari mereka yang mewakili kepentingan bukan kaum elit.

3. Pembentukan kelompok-kelompok atau organisasi yang mendukung pembangunan pedesaan.<sup>14</sup>

Pada kenyataannya partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan yang berjalan yang perlu diperhatikan adalah bervariasinya intensitas beberapa lapisan masyarakat yang ada misalnya saja tentang pendidikannya serta bervariasinya motivasi yang mendorong partisipasi dalam kegiatan program tersebut.

Menurut Moeljarto motifasi mendasari partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1. Berpartisipasi karena perasaan rasa takut.
2. Berpartisipasi karena sekedar ikut-ikutan solidaritas
3. Berpartisipasi karena dasar , bahwa partisipasi tersebut merupakan hak dan sekaligus kewajibannya.<sup>15</sup>

Menurut pandangan penulis, bentuk partisipasi karena megerti dan sadar bahwa berpartisipasi adalah merupakan hak dan sekaligus kewajibannya inilah yang paling ideal. Oleh karena itu bentuk partisipasi yang disadari dianggap paling ideal, maka yang penting untuk di perhatikan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat

---

<sup>14</sup> Moeljarto, "Politik Pembangunan" Tiara Wawancara, Yogyakarta, 1987 hal 48-49

<sup>15</sup> Ibid, hal 50

adalah menanamkan pengertian secara luas dan merata tentang makna program pemerintah itu sendiri. Disamping hal-hal diatas partisipasi yang dibahas dalam penelitian ini adalah partisipasi didalam pembangunan fisik desa. Partisipasin dalam pembangunan fisik desa ini yang paling utama adalah 3 hal:

1. Partisipasi dalam penyusunan atau perencanaan kegiatan.
2. Partisipasi dalam implementasi atau pelaksanaan kegiatan.
3. Partisipasi dalam evaluasi atau penilaian kegiatan.

Pertama, partisipasi dalam penyusunan atau perencanaan kegiatan. Maksudnya adalah seluruh anggota masyarakat sangat diharapkan keterlibatannya dalam segala penyusunan atau perencanaan kegiatan pembangunan fisik desa yang akan dilaksanakan. Dalam perencanaan kegiatan ini akan dibahas mengenai hal-hal yang menyangkut pembangunan desa khususnya pembangunan fisik seperti: bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan, kapan waktu pelaksanaannya, sumber-sumber dana yang akan digali. Untuk membahas perencanaan pembangunan ini, diperlukan adanya komunikasi yang baik antar warga desa dan aparat desa. Maka dalam proses perencanaan pembangunan ini dikenal dengan adanya 2 arah yaitu:

1. Proses dari atas ke bawah, yakni dengan adanya kebijakan dari pemerintah desa yang dituangkan dalam kebijakan operasional dalam bentuk sektor pembangunan yang akan dilaksanakan.

2. Proses dari bawah ke atas, dalam arti datangnya rencana dan keinginan pembangunan adalah dari bawah yaitu warga masyarakat yang tertuang dalam berbagai bentuk rencana kegiatan.

Proses perencanaan pembangunan desa baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas sama-sama memerlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkannya. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan peran masyarakat sangat penting yang dapat diwujudkan dalam bentuk: kedatangan masyarakat sewaktu diadakan pertemuan untuk merencanakan pembangunan desa, pemberian ide-ide dan usulan-usulan mengenai pembangunan, memberikan solusi tentang sumber dana yang akan digali, prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu, perencanaan mengenai waktu pelaksanaan yang dibangun.

Kedua partisipasi masyarakat dalam implementasi atau pelaksanaan kegiatan. Dalam pembangunan desa keberhasilan pembangunan sangat tergantung dari pelaksanaan pembangunan dari masyarakat yang melibatkan tenaga pembangunan yang diwujudkan dengan gotong royong, dana yang dipakai telah sesuai dengan yang direncanakan, alat-alat pembangunan yang di gunakan (sekop, meteren, gergaji, cangkul dan lainnya), menggunakan bahan-bahan yang berkualitas (padir, besi, kayu, batu, semen dan lainnya).

Ketiga partisipasi masyarakat dalam evaluasi kegiatan. Setelah tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan selesai, maka hal terakhir yang dilakukan adalah mengevaluasi hasil dari pembangunan itu sendiri. Yaitu dengan membandingkan antara segala sesuatu yang dilaksanakan dalam pembangunan dengan sebenarnya terjadi dalam pelaksanaannya. Sehingga diketahui adanya kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan pembangunan, ada penyimpangan pembangunan atau tidak dan apakah pembangunan telah sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan oleh warga masyarakat.

## 2. Pembangunan Fisik Desa

### a. Pengertian Desa

Menurut Soetardjo Kartohadikusumo desa diartikan sebagai berikut:

”Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.”

Pengertian desa menurut UU No.5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yaitu:

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan



masyarakat hukum, suatu masyarakat yang berkuasa langsung dibawah camat dan berhak mengadakan pemerintahan sendiri.

b. Pengertian pembangunan fisik desa

Pengertian pembangunan menurut Siagian yaitu:

“Pembangunan adalah serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.”<sup>16</sup>

Pengertian pembangunan menurut Ibnu Syamsi adalah:

“Pembangunan merupakan proses perubahan system yang direncanakan dan pertumbuhan menuju arah perbaikan yang berorientasi yang moderinitas, pembinaan bangsa dan kemajuan social ekonomi.”<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Perroux pengertian pembangunan adalah:

“Pembangunan adalah kombinasi dari perubahan mental dan sosial di masyarakat, yang memungkinkan produk nyata dari masyarakat yang bersangkutan meningkat atau bertambah secara kumulatif dan terus menerus.”<sup>18</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan beberapa hal tentang pembangunan:

1. pembangunan adalah suatu proses pembaharuan yang dilakukan secara sadar dan melalui perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan tersebut mengarah terhadap peningkatan secara kumulatif secara terus menerus produk nyata dari masyarakat.
2. pembaharuan itu bermula dari suatu keadaan yang dianggap kurang baik kemudian mengarah pada keadaan yang lebih baik.

---

<sup>16</sup> Siagian, Sondang P, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1982 hal 4

<sup>17</sup> Syamsi, Ibnu, *Pokok-pokok Organisasi dan Menejemen*, Bina Aksara, Jakarta, 1983 hal 10

<sup>18</sup> Perroux dalam Taliziduhndrah, *Metodelogi Pembangunan Desa*, Bina Aksara 1983

3. pembangunan itu dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah.

Jadi pembangunan adalah suatu proses pembaharuan dan pertumbuhan yang direncanakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Apabila pembangunan dikaitkan dengan pemerintah desa, maka proses pembaharuan dan pertumbuhan yang telah direncanakan tersebut direncanakan oleh pemerintah desa dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam perkembangan selanjutnya pengertian pembangunan banyak diterapkan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Hal demikian merupakan penyebab terjadinya beberapa sudut pandang dalam memberikan pengertian pembangunan. Dari berbagai sudut pandang yang dikemukakan dalam konsep ataupun pengertian politik dan berbagai bidang lainnya.

Dari sudut pandang tersebut pembangunan dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu: pembangunan yang bersifat fisik material dan pembangunan yang bersifat spiritual. Pembangunan yang bersifat fisik material adalah pembangunan yang secara langsung nampak dapat dirasakan oleh panca indra dengan kata lain lebih bersifat nyata.

Menurut Talizi Dhuhu Ndraha pembangunan fisik dibagi menjadi beberapa bagian:

1. Prasarana produksi, misalnya: DAM, bendungan, saluran air, listrik dan lainnya.
2. Prasarana pemasaran, misalnya: kios, toko, pasar, gedung dan lainnya.
3. Prasarana perhubungan, misalnya: jembatan, jalan dan lainnya.
4. Prasarana sosial, misalnya: gedung SD, Puskesmas, masjid, lapangan olah raga dan lainnya.

Berdasarkan keterangan diatas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan fisik desa adalah suatu program yang dilaksanakan untuk perubahan kearah kemajuan mengenai prasarana fisik yang ada di desa yang dicanangkan oleh pemerintah desa setempat dan juga oleh masyarakat desa tersebut. Pembangunan prasarana fisik dapat berupa prasarana produksi, prasarana pemasaran, prasarana perhubungan dan prasarana sosial.

Pembangunan desa mempunyai ciri-ciri seperti yang dikemukakan oleh Talizidulu Ndraha sebagai berikut:

1. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat desa yang bersangkutan dalam proses pembangunan proyek. Tanpa partisipasi aktif masyarakat yang bersangkutan pembangunan itu bukanlah pembangunan desa.
2. Proses pembangunan desa adalah berencana dan diorganisasikan guna membantu masyarakat memperoleh sikap, ketrampilan dan pengertian yang diperlukan untuk mampu berpartisipasi aktif.
3. Membangun desa berarti membangun prasarana.

4. Karena pembangunan desa juga menyangkut pembangunan masyarakat, maka pembangunan berarti membangun swadaya dan mengintensifkan partisipasi masyarakat.

#### **F. Definisi Konseptual**

1. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, tahun 2006/2007.
2. Masyarakat adalah seluruh anggota masyarakat Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Yang meliputi: perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan lain-lain.
3. Pembangunan fisik desa adalah suatu program pembangunan yang dilaksanakan untuk perubahan kearah kemajuan tentang prasarana fisik yang ada di desa yang dicanangkan oleh pemerintah desa setempat dan juga oleh masyarakat. (prasarana pemasaran, produksi, perhubungan dan sosial)

#### **G. Definisi Operasional**

1. Partisipasi masyarakat dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:
  - a. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan fisik desa
    - Kehadiran masyarakat dalam rapat desa
    - Usulan atau ide yang diajukan oleh masyarakat dalam rapat desa
    - Pemberian solusi sumber-sumber dana untuk pembangunan

- Prioritas pembangunan fisik yang akan dilaksanakan terlebih dahulu
  - Wilayah atau daerah mana saja yang akan dibangun
- b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa
- Tenaga pembangunan berupa gotong royong dari masyarakat
  - Sumber-sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan
  - Alat-alat pembangunan yang akan dipergunakan
  - Bahan-bahan material yang akan digunakan
- c. Evaluasi pembangunan fisik desa
- Perbandingan antara yang seharusnya terjadi dan sebenarnya terjadi dalam pembangunan fisik desa
  - Ada tidaknya penyimpangan dalam proses pembangunan fisik desa
2. Perencanaan dalam realisasi pembangunan fisik :
- a. Adanya peningkatan jumlah sarana dan prasarana pembangunan fisik desa.
- b. Hasil-hasil pembangunan dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat.
- c. Besarnya biaya, ketepatan waktu serta produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan rencana.
- d. Intensitas kemampuan desa dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli desa.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, yang mana dilakukan dengan metode-metode.

Dengan demikian metode dalam suatu penelitian merupakan bagian yang harus ada. Adapun penyusunan dalam penelitian menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu istilah yang umum yang mencakup beberapa teknik deskriptif diantaranya penelitian yang menuturkan, mengklasifikasikan, menggambarkan dan menganalisa data serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang ini dengan menggunakan teknik observasi, interview dan dokumentasi.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini hanya dibatasi di Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah. Dengan kesimpulan yang diperoleh nantinya hanya berlaku pada desa dimana penelitian ini akan dilaksanakan

### **3. Unit Analisis**

Sejalan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa, meliputi: perangkat desa, pemuda,

tokoh masyarakat, dan seluruh anggota masyarakat Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah.

#### 4. Sumber Data

##### a) Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan jalan melakukan observasi maupun wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

##### b) Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu menggunakan studi pustaka atau mengumpulkan data dari buku-buku yang ada kaitannya dengan observasi yang akan dilakukan.

#### 5. Teknis Pengumpulan Data

##### a) Observasi

Yaitu metode ini digunakan sebagai metode pengumpulan data yaitu dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan yang sistematis tentang fenomena-fenomena yang diteliti.

##### b) Wawancara/interview

Yaitu merupakan suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh data yang diinginkan.

##### c) Dokumentasi

Yaitu merupakan sumber-sumber data atau dokumen yang terdapat di desa.

## 6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan, selanjutnya menganalisa atau obyek yang diteliti dan menginterpretasikan atas dasar teori yang ada serta runtut memakai makna yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data yang memberikan penyajian laporan tersebut.